

**PENGARUH KUALITAS LAPORAN KEUANGAN, PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
(Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru)**

**Oleh :**

**Hafzan Fikrian**

**Pembimbing : Amir Hasan dan Al Azhar A.**

*Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia*

Email: [hafzan.fikrian64@yahoo.com](mailto:hafzan.fikrian64@yahoo.com)

*Effect Of The Quality Of Financial Statements, Financial Statements Presentation Of Financial Statements And Accessibility Of Regional Financial Management Accountability (Empirical Study On Unit Of Work Pekanbaru City Area)*

**ABSTRACT**

*This study aims to describe the influence of Quality of Financial Reporting, Financial Statements Effect, and Effect Against Accountability Accessibility Financial Statements of Financial Management At Work Unit of City of Pekanbaru. The population covers all aspects related to the preparation of financial statements in government agencies located in the city of Pekanbaru. The population in this study consisted of all SKPD contained in Pekanbaru city as much as 32 SKPD. Each SKPD will be spread as much as 3 questionnaire consisted of Chief SKPD, Head of Finance and Head of the planning of each SKPD contained in Pekanbaru, bringing the total respondents were 96 respondents. Further analysis of data using multiple regression analysis through SPSS 17.0 software msi. The result of the calculation as described is known that affect the quality of financial statements Financial Management Accountability. The result of the calculation as described can be seen that the effect on the financial statements of Financial Management Accountability. The result of the calculation as described can be seen that the effect on the accessibility of Financial Statements Financial Management Accountability in the SKPD Pekanbaru.*

*Keywords: Quality, Presentation, Accessibility, and Accountability*

**PENDAHULUAN**

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar benar dapat dilaporkan dan di pertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya

sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Halim, 2012: 27).

Berbagai faktor dapat mempengaruhi akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Salah satunya adalah kualitas laporan keuangan. Kualitas pelaporan Keuangan dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintahan daerah. Pemenuhan tujuan dan laporan keuangan akan bermanfaat dan dapat memenuhi tujuannya jika memenuhi empat karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu dapat dipahami (*understandability*), relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dan dapat dibandingkan (*comparability*). Informasi dapat dipahami bilamana pengguna dapat memahami laporan keuangan yang disajikan (Sukhemi, 2011).

Selain kualitas laporan keuangan, penyajian laporan keuangan juga dapat mempengaruhi akuntabilitas. Penyajian laporan keuangan oleh pemerintah pusat dan daerah dimaksudkan untuk mewujudkan *good governance*. Pemberlakuan otonomi daerah dari pemerintah pusat ke daerah kemudian menjadikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai prasyarat perwujudan *good governance*.

Menurut Steccolini (2012), ketidakmampuan laporan keuangan

dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel kepada para pengguna potensial.

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar. Aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana, 2009). Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan *website* (internet); dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet, 2010).

Isu lain dalam penelitian ini adalah akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, *website* (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet dalam Mulyana, 2009). Namun dalam kenyataannya, BPK menemukan masih banyak permasalahan pada pengelolaan keuangan pemerintah

Kota Pekanbaru yang menunjukkan lemahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. BPK juga menemukan masih banyak permasalahan pada penyajian laporan keuangan pemerintah Kota Pekanbaru. Di samping itu, pemerintah Kota Pekanbaru juga belum mampu menyediakan semua informasi keuangan secara terbuka kepada publik.

Isu rendahnya akuntabilitas semakin dipertegas dengan adanya laporan audit yang disampaikan oleh BPK yang menyatakan bahwa mayoritas laporan keuangan pemerintah daerah diseluruh Indonesia masih mendapatkan penilaian buruk Harian Riau Pos (tertanggal 2 Februari 2012). Pernyataan tersebut didasarkan pada kembalinya BPK memberikan opini tidak memberikan pendapat (*disclaimer*) atas mayoritas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2011. Penilaian yang buruk ini juga diberikan kepada laporan keuangan pemerintah pusat. Bahkan selama empat tahun berturut-turut, sampai tahun 2011, opini disclaimer ini diberikan untuk laporan keuangan pemerintah pusat. Alasan masih banyaknya pemerintah daerah yang dinilai buruk dalam melaporkan keuangannya, karena belum adanya UU yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan secara rinci. Kepala BPK, Anwar Nasution menegaskan pemerintah daerah yang mendapatkan opini buruk dalam laporan keuangannya harus memperbaiki dan membenahi berbagai kelemahannya (BPK, 2012).

Dalam penelitian ini disajikan perumusan masalah yaitu: 1) Apakah Kualitas Pelaporan Keuangan

berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Satuan kerja perangkat Daerah Kota Pekanbaru? 2) Apakah Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru? 3) Apakah Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru?

Kemudian, tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui Pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. 2) Untuk mengetahui Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. 3) Untuk mengetahui Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

## TELAAH PUSTAKA

### 1. Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas pelaporan Keuangan dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintahan daerah. Pemenuhan tujuan dan laporan keuangan akan bermanfaat dan dapat memenuhi tujuannya jika memenuhi empat karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu dapat dipahami (*understandability*), relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dan

dapat dibandingkan (*comparability*). Informasi dapat dipahami bilamana pengguna dapat memahami laporan keuangan yang disajikan Sukhemi (2011). Kualitas pelaporan keuangan secara jelas dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang sekarang menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, bahwa kualitas pelaporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki jika memenuhi unsur kualitatif laporan keuangan yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya, antara lain pelaporan keuangan tersebut memenuhi unsur relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah unit pemerintahan pengguna anggaran yang diwajibkan menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabung pada entitas pelaporan. SKPD selaku pengguna anggaran harus menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya. Hal ini berarti bahwa setiap SKPD harus membuat laporan keuangan unit kerja.

Laporan keuangan yang harus dibuat setiap unit kerja adalah laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

## **2. Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggung jawaban publik. Pertanggung jawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggung jawab dan pengelolaan (Mardiasmo, 2014).

Halim dan Abdullah (2008) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan adalah salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Tidak adanya laporan keuangan memperlihatkan lemahnya akuntabilitas. Tuntutan akuntabilitas di sektor publik terkait dengan perlu dilakukannya transparansi dan pemberi informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

## **3. Aksesibilitas**

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Rohman, 2009). Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan (Mulyana, 2009). Laporan keuangan harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka yang tertarik dan mau berusaha untuk memahaminya (Rohman, 2009).

laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus

diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (*accountability dan stewardship*).

Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan *website* (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Mulyana, 2009).

#### 4. Akuntabilitas

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut (Halim : 2012).

Anggaran tahunan secara khusus mempunyai otoritas legal untuk pengeluaran dana publik, sehingga proses penganggaran secara keseluruhan menjadi relevan untuk manajemen fiskal dan untuk melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan

pengendalian pada berbagai tingkat operasi (Shende dan Bennet, 2010).

Dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 (Pasal 1), keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Bila dilihat dari ruang lingkupnya, keuangan daerah meliputi kekayaan daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pengurusannya.

#### Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

##### 1. Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki (Nordawan, 2010:74-78).

Sehubungan dengan pernyataan di atas, maka dapat disajikan hipotesis yaitu:

**H1:** Diduga Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

##### 2. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas

Menurut Nordiawan (2010), tujuan penyajian laporan keuangan adalah: 1) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran 2) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan.

Sehubungan dengan pernyataan di atas, maka dapat disajikan hipotesis yaitu:

**H2:** Diduga Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

### 3. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Rohman, 2009). Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh

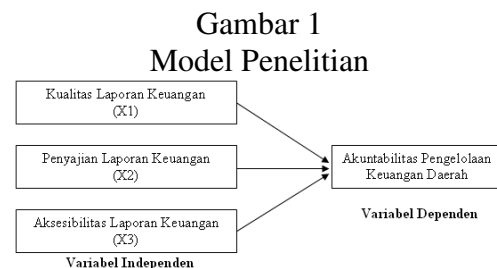
informasi mengenai laporan keuangan (Mulyana, 2009). Laporan keuangan harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka yang tertarik dan mau berusaha untuk memahaminya (Rohman, 2009).

Sehubungan dengan pernyataan di atas, maka dapat disajikan hipotesis yaitu:

**H3:** Diduga Aksesibilitas berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

### Model Penelitian

Sehubungan dengan variabel dalam penelitian ini, maka dapat digambarkan model penelitian sebagai berikut:



Sumber: Data Olahan, 2016

### METODOLOGI PENELITIAN

Populasi meliputi seluruh aspek yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan di instansi pemerintah yang terdapat di Kota Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh SKPD yang terdapat di Kota Pekanbaru sebanyak 32 SKPD. Tiap SKPD akan disebar sebanyak 3 kuisioner terdiri dari Kepala SKPD, Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Bagian perencanaan dari setiap SKPD yang terdapat di Kota Pekanbaru, sehingga total responden sebanyak 96

responden. Dalam penelitian ini diperoleh responden sebanyak 96 dari 32 SKPD yang terdapat di Kota Pekanbaru. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposive random sampling yaitu telah ditetapkan orang-orang yang menjadi sampel dalam penelitian ini seperti kepala SKPD yang terdapat di Kota Pekanbaru. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dari hasil kuesioner. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan secara wawancara, angket dan dokumentasi. Kemudian analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan menggunakan software SPSS 17.0 msi.

Tahapan dalam analisis data meliputi:

#### **Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2006). Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner digunakan *corrected item-total correlation*. Jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel maka dapat dikatakan valid, dimana  $r$  tabel untuk  $n=32$  adalah 0,282.

#### **Uji Reliabilitas**

Kuesioner dikatakan reliabel (handal) jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2006). Untuk uji reliabilitas digunakan pengujian *cronbach alpha*.

#### **Uji Normalitas**

Alat diagnostik yang digunakan untuk memeriksa data yang memiliki

distribusi normal dengan menggunakan one sample Kolmogorov Smirnov. Uji Kolmogorov Smirnov, dapat diketahui bahwa *Unstandardized Residual* memiliki nilai signifikansi lebih besar dari ( $>$ ) 0,05. Nilai residual berdistribusi normal karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. maka dari itu, hasil penelitian ini dapat diterima.

#### **Uji Multikolinearitas**

Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan *variance inflation factor (VIF)* dan *tolerance*. Multikolinearitas terjadi jika VIF lebih besar dari 10 dan nilai *tolerance* kurang dari 0.1.

#### **Uji Heteroskedastisitas**

Untuk melihat adanya heteroskedastisitas dapat dilihat dari scatterplotnya dimana sebaran datanya bersifat *increasing variance* dari *decreasing variance* dan kombinasi keduanya.

Selain itu, juga dapat dilihat melalui grafik normalitasnya terhadap variabel yang digunakan. Jika data yang dimiliki terletak menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas dan tidak ada yang berpencar maka dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas tetapi homokedastisitas. Pengujian asumsi ketiga adalah *heteroscedasticity* untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas yang dilakukan dengan *Glejser-test*.

#### **Uji Autokorelasi**

Autokorelasi adalah korelasi antara anggota-anggota serangkaian observasi yang tersusun dalam rangkaian waktu atau yang tersusun

dalam rangkaian ruang konsekuensi dari adanya autokorelasi dalam suatu model regresi adalah varians sampel tidak menggambarkan varians populasinya. Untuk menguji ada tidak autokorelasi, diukur dengan menggunakan statistik *Durbin Watson*.

### **Analisis Regresi Berganda**

Metode analisis data yang digunakan analisis regresi linier berganda dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e_i$$

Keterangan:

Y = Akuntabilitas

a = Konstanta

X<sub>1</sub> = Kualitas Laporan Keuangan

X<sub>2</sub> = Penyajian Laporan Keuangan

X<sub>3</sub> = Aksesibilitas

b<sub>1-5</sub> = Koefisien regresi

e<sub>i</sub> = Variabel pengganggu

### **Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2013: 97)

### **Uji t**

Untuk melakukan pengujian hipotesis secara parsial digunakan uji statistik t. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013: 98). Untuk dapat mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen, maka dibandingkan antara nilai  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  serta

membandingkan nilai signifikan t dengan *level of significant* ( $\alpha$ ). Nilai *level of significant* yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5%. Apabila sig t lebih kecil dari 0,05 maka H<sub>0</sub> diterima. Demikian pula sebaliknya jika sig t lebih kecil dari 0,05 maka H<sub>0</sub> ditolak. Bila h<sub>0</sub> ditolak, ini berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

### **Uji F**

Uji F dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat. Hasil uji F pada output SPSS dapat dilihat pada tabel anova.

Tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05 yang lazim digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial. Apabila F hitung > F tabel, maka terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Sebaliknya jika F hitung < F tabel maka variabel bebas tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikatnya.

### **Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian**

#### **Kualitas Laporan Keuangan (X1)**

1. Memiliki Manfaat umpan balik
2. Memiliki manfaat prediktif
3. Tepat waktu
4. Lengkap
5. Penyajian jujur
6. Dapat diverifikasi
7. Laporan keuangan dapat dibandingkan Secara eksternal maupun intrnal
8. Dapat dipahami penggunaanya.

#### **Penyajian Laporan Keuangan (X2)**

1. SKPD mampu menyusun laporan keuangan secara lengkap (Laporan Realisasi Anggaran,



- Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan).
2. SKPD mampu menyelesaikan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan) tepat waktu.
  3. Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan SKPD telah menggambarkan dengan jujur transaksi yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan.
  4. Apabila dilakukan pengujian terhadap laporan keuangan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
  5. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.
  6. Laporan keuangan yang disusun oleh SKPD telah dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.
  7. Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan SKPD bebas dari kesalahan yang bersifat material.
  8. Informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan SKPD memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan.

### **Aksesibilitas Laporan Keuangan (X3)**

1. Laporan keuangan daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa.
2. Memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah.

3. Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (*website*)

### **Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)**

1. APBD disusun dengan pendekatan kinerja
2. Pemerintah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan
3. Jika ada perubahan, APBD ditetapkan paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran tertentu berakhir
4. Pendapatan daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Pelaporan keuangan daerah dibuat dalam bentuk laporan keuangan
6. laporan keuangan SKPD di review oleh inspektorat sebelum diserahkan kepada BPK
7. Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan
8. Dilakukannya *financial audit* terhadap laporan keuangan daerah.
9. SKPD mampu menyusun laporan keuangan secara lengkap (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan).
10. SKPD mampu menyelesaikan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan) tepat waktu.
11. Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan SKPD telah menggambarkan dengan jujur transaksi yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan.

12. Apabila dilakukan pengujian terhadap laporan keuangan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
13. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengolahan data primer merupakan deskriptif penelitian berdasarkan pendapat responden mengenai Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD Pekanbaru. Analisis deskriptif untuk tiap variabel dalam penelitian ini didasarkan pada jawaban tiap pernyataan dari responden dari skala sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Tabel 1 *descriptive statistics* di bawah ini menunjukkan angka minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi..

**Tabel 1.**  
**Statistik Deskriptif**

Variabel	Teoritis		Sesungguhnya			N
	Kisaran	Mean	Kisaran	Mean	Std. Deviasi	
X1	2-5	3,88	2-5	3,8816	0,58155	49
X2	2-5	3,80	2-5	3,8047	0,30238	49
X3	2-5	3,79	2-5	3,7888	0,46470	49

**Sumber:** Data Olahan 2016

### Hasil Pengujian Normalitas Data

Pengujian normalitas data dapat juga dilihat dengan one sample Kolmogrov Smirnov sebagai mana pada Tabel berikut ini:

**Tabel 2.**  
**Kolmogorof Smirnov**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test							
		X1	X2	X3	X4	X5	Y
N		49	49	49	49	49	49
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	3.8816	3.8047	3.7888	3.8776	3.9251	382.4490
	Std. Deviation	.58155	.30238	.46470	.40222	.50600	45.71336
Most Extreme Differences	Absolute	.138	.144	.172	.171	.232	.132
	Positive	.086	.116	.172	.136	.155	.077
	Negative	-.138	-.144	-.123	-.171	-.232	-.132
Kolmogorov-Smirnov Z		.966	1.008	1.206	1.194	1.626	.922
Asymp. Sig. (2-tailed)		.308	.262	.109	.115	.071	.363

**Sumber:** Data Olahan 2016

Dari uji Kolmogrov Smirnov, dapat diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki nilai signifikansi Kualitas laporan keuangan sebesar 0,308, Faktor penyajian laporan keuangan sebesar 0,262, Aksesibilitas sebesar 0,109, Faktor peraturan perundang-undangan sebesar 0,115 dan Faktor Latar Belakang Pendidikan sebesar 0,071. Nilai ini lebih besar dari (>) 0,05. Dengan demikian hasil pengujian ini menunjukkan bahwa nilai residual berdistribusi normal karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. maka dari itu, hasil penelitian ini dapat diterima.

### Hasil Pengujian Autokorelasi

Berikut ini adalah hasil uji statistik mengenai ada tidaknya autokorelasi pada penelitian ini:

**Tabel 3.**  
**Hasil Pengujian Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.704 <sup>a</sup>	.496	.430	.74616	1.218

**Sumber:** Data Olahan 2016

Berdasarkan hasil uji Durbin-Watson dengan menggunakan SPSS Versi 17.0, maka diperoleh nilai DW sebesar 1,218. Dengan hasil perhitungan ini, maka dapat diketahui bahwa nilai di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi.

### Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pendeteksian ada tidaknya heteroskedastisitas bisa dilakukan dengan menggunakan metode *Glejser Test*, yaitu dengan cara meregresikan nilai *absolute* residual terhadap variabel independen.

**Tabel 4.**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-30.172	71.163		-.424	.674
	X1	-1.979	7.824	-.044	-.253	.802
	X2	-9.790	14.732	-.112	-.665	.510
	X3	11.961	11.227	.211	1.065	.293

Sumber: *Data Olahan 2016*

Hasil uji heteroskedastisitas yang ditampilkan pada Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa probabilitas signifikansi semua variabel independen lebih dari tingkat kepercayaan 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi ini memenuhi asumsi heteroskedastisitas. Dengan kata lain pada model regresi ini terdapat variasi data homoskedastisitas, terjadi kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

### Hasil Pengujian Multikolinearitas

Berdasarkan hasil pengolahan data, pada Tabel 5 dapat dilihat hasil dari uji multikolinearitas sebagai berikut:

**Tabel 5.**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
X1	.716	1.397
X2	.747	1.339
X3	.544	1.837

Sumber: *Data Olahan, 2016*

Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai tolerance pada hasil analisis data, diperoleh nilai VIF untuk variabel sosiodemografi dan kemampuan. Nilai VIF terbesar sebesar  $0,747 > 0,10$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas.

### Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 6 berikut:

**Tabel 6.**  
**Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.704 <sup>a</sup>	.496	.430	.74616

Sumber: *Data Olahan 2016*

Berdasarkan Tabel 6 di atas diperoleh nilai R sebesar 0.704 yang menunjukkan adanya hubungan yang sedang antara Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD Pekanbaru.  $R^2$  sebesar 0.496 artinya variabel Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD Pekanbaru secara bersama-sama mempengaruhi penyusunan APBD sebesar 49,6%. Sedangkan sisanya sebesar 40,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

### Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa koefisien regresi, nilai t dan signifikansi adalah seperti pada Tabel 7 berikut:

**Tabel 7.**  
**Uji t**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,459	2,501		4,029	,000
	X1	4,197	,249	,181	3,715	,000
	X2	6,476	,945	,175	4,061	,000
	X3	6,055	,011	,163	4,845	,000

**Sumber:** *Data Olahan 2016*

Dari Tabel 7 maka diperoleh persamaan regresi yang dihasilkan adalah :

$$Y = 5,459 + 4,197x_1 + 6,476x_2 + 6,055x_3$$

### Hipotesis 1

Berdasarkan tabel 7. diketahui  $t_{hitung} (3,715) < -t_{tabel} (1,68023)$  dan  $Sig.(0,000) < 0,05$  maka dapat diketahui bahwa Kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap penetapan APBD Kota Pekanbaru karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$ . Dengan demikian, **hipotesis 1 diterima.**

Hasil perhitungan sebagai mana yang telah diuraikan dapat diketahui bahwa Kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan demikian  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  diterima. Semakin berkualitas laporan keuangan maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan semakin baik. Sebaliknya jika laporan keuangan tidak berkualitas, maka akan terjadi penurunan dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan demikian faktor ini berpengaruh positif.

Kualitas pelaporan keuangan secara jelas dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang sekarang menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, bahwa kualitas pelaporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki jika memenuhi unsur kualitatif

laporan keuangan yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya, antara lain pelaporan keuangan tersebut memenuhi unsur relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Mursyidi (2010) mengatakan bahwa penyajian laporan keuangan adalah salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Dengan demikian tidak adanya laporan keuangan berkualitas menunjukkan lemahnya akuntabilitas. Lebih lanjut lemahnya akuntabilitas tersebut mengindikasikan lemahnya sistem yang selanjutnya berimbas pada membudayannya korupsi sistematis.

### Hipotesis 2)

Berdasarkan tabel 7. diketahui  $t_{hitung} (4,061) < -t_{tabel} (1,68023)$  dan  $Sig.(0,000) < 0,05$  maka dapat diketahui bahwa Faktor penyajian laporan keuangan antara eksekutif dan legislative berpengaruh signifikan terhadap penetapan APBD Kota Pekanbaru karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$ . Dengan demikian, **hipotesis 2 diterima.**

Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana yang telah diuraikan dapat diketahui bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan demikian  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  diterima. Semakin lengkap penyajian laporan keuangan maka akuntabilitas akan cepat terlaksana. Sebaliknya jika penyajian laporan keuangan kurang lengkap, maka akan menyebabkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang kurang baik, dengan demikian faktor ini berpengaruh positif.

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas public menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2014).

### Hipotesis 3

Berdasarkan tabel 7. diketahui  $t_{hitung} (4,845) < -t_{tabel} (1,68023)$  dan  $Sig.(0,000) < 0,05$  maka dapat diketahui bahwa Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap penetapan APBD Kota Pekanbaru karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$ . Dengan demikian, **hipotesis 3 diterima.**

Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana yang telah diuraikan dapat diketahui bahwa Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, maka  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  diterima. Semakin tinggi aksesibilitas Laporan Keuangan maka akuntabilitas pengelolaan keuangan akan tercapai. Sebaliknya jika aksesibilitas Laporan Keuangan rendah, maka Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah akan kurang transparan. Dengan demikian, faktor ini berpengaruh positif.

Pemerintah daerah harus memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan. Apalah artinya menyajikan laporan keuangan dengan baik tapi tidak memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, maka usaha untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan

daerah tidak akan berjalan dengan baik. Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar..

### Hasil Uji Simultan (Uji F)

Untuk mengetahui factor-faktor yang menyebabkan keterlambatan dalam penetapan APBD di Kota Pekanbaru, maka digunakan suatu model statistik yaitu ANOVA (*Analisis of Variance*) dari model regresi berganda yang diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 8.**  
**Uji F**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	20.818	5	4.131	7.238	.000 <sup>a</sup>
Residual	21.157	43	.497		
Total	41.975	48			

**Sumber:** Data Olahan 2016

Uji F digunakan untuk menguji secara bersama-sama dari tiap variabel. Dari table F diperoleh nilai F untuk  $n = 49$  dan  $k = 5$ .  $n = 49 - 5 - 1 = 43$ .

$F_{0,05} (5 : 49) = 1,99682$ . Dari hasil pengujian diketahui perhitungan regresi diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 7,238 dengan tingkat ( $\alpha$ ) 5% atau signifikan signifikan  $0,000 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_i$  diterima., Nilai  $F_{table}$  sebesar 1,99682. Hal ini menunjukkan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $7,238 > 1,99682$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_i$  diterima. Artinya secara bersamaan, variabel Kualitas laporan

keuangan, penyajian laporan keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Pekanbaru.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Simpulan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil perhitungan sebagaimana yang telah diuraikan dapat diketahui bahwa Kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Semakin berkualitas laporan keuangan maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan semakin baik.
- 2) Hasil perhitungan sebagaimana yang telah diuraikan dapat diketahui bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Semakin lengkap penyajian laporan keuangan maka akuntabilitas akan cepat terlaksana.
- 3) Hasil perhitungan sebagaimana yang telah diuraikan dapat diketahui bahwa Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, maka  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  diterima. Semakin tinggi aksesibilitas Laporan keuangan maka akuntabilitas pengelolaan keuangan akan tercapai.

### **Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh maka

peneliti memberikan saran, antara lain:

- 1) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengatasi kelemahan dari pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menambah metode wawancara agar responden dapat memberi jawaban kuesioner dengan benar-benar diliputi kesungguhan dan keseriusan sehingga peneliti lebih terlibat dalam proses penelitian tersebut.
- 2) Penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat menambah jumlah sampel yang diteliti dan memperluas lokasi penelitian sehingga diharapkan tingkat generalisasi dari analisis lebih akurat.
- 3) Untuk penelitian selanjutnya hendaknya disarankan menambah variabel independen sehubungan dengan variabel yang belum diteliti sehubungan dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sehingga dapat diketahui bagaimana mengatasi kelemahan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ghozali, Imam. 2006. *Structural Equation Modelling Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2013. *Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Halim, Abdul, 2012, *Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah* Edisi Revisi, Jakarta. Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_, dan Abdullah, S. 2008. Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah: Sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1): 53-64.
- Mardiasmo. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Edoso Revoso Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Nordiawan, D. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Mulyana, B. 2009. *Pengaruh Penyajian Neraca daerah dan Aksebilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*, Tesis S2, Magister Akuntansi UGM Tidak Dipublikasikan. Yogyakarta.
- Mursyidi. 2010. *Akuntansi Dasar*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Rohman, Abdul. 2009. *Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah daerah (Survey Pada Pemda di Jawa Tengah)*, Jurnal Akuntansi. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Sukhemi, 2011. *Analisis Pengaruh Penyajian Neraca Daerah, Aksesibilitas, Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah*. Magister Akuntansi UGM. Hasil penelitian Tidak Dipublikasikan. Yogyakarta
- Shende, S. dan T. Bennett. 2010. *Concept Paper 2: Transparency and Accountability in Public Financial Administration*. UN DESA.
- Steccolini, I. 2012. *Local Government Annual Report: an Accountability Medium?. EIASM Conference on Accounting and Auditing in Public Sector Reforms*. Dublin. 2012.